

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

# RENCANA KERJA

2024

BADAN KEUANGAN  
& ASET DAERAH





**BUPATI BARRU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARRU  
NOMOR 12 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

**BUPATI BARRU,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



- Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023



- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);



19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah



(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
36. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);
37. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 23);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran



- Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 16);
  40. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 1);
  41. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 5);
  42. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 6);
  43. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 3);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor 8).
45. Peraturan Bupati Barru Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARRU TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Bupati adalah Bupati Barru.
3. Perangkat Daerah adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
5. Rencana Stategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun;
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

**BAB II**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Maksud disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan perencanaan, Penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan



pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

### **Pasal 3**

Tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yaitu;

- a. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- b. sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan prioritas pembangunan daerah;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkat pemerintahan; dan
- d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

### **BAB III**

#### **SISTEMATIKA**

#### **Pasal 4**

- (1). Sistematika penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 sebagai berikut :
  - a. BAB I PENDAHULUAN;
  - b. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
  - c. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
  - d. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; dan
  - e. BAB V PENUTUP.
- (2). Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang pada masing-masing Renja Perangkat Daerah dan menjadi Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

#### **Pasal 5**

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- f. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
- g. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. Dinas Lingkungan Hidup;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Dinas Perikanan;
- l. Dinas Kesehatan;
- m. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- n. Dinas Perhubungan;
- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- p. Dinas Tenaga Kerja;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan;
- r. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- t. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- u. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- v. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- w. Badan Pendapatan Daerah;
- x. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- y. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- z. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- aa. Kecamatan Barru;
- bb. Kecamatan Tanete Rilau;
- cc. Kecamatan Tanete Riaja; dd. Kecamatan Pujananting; ee. Kecamatan Balusu;
- dd. Kecamatan Soppeng Riaja;
- ee. Kecamatan Mallusetasi.



## Pasal 6

Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan berkenaan; dan/atau
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

## BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru

Ditetapkan di Barru

pada tanggal 4 Agustus 2023



Diundangkan di Barru

pada tanggal 4 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2023 NOMOR

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) ini yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam peraturan tersebut diamanatkan bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), kepala perangkat daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran perangkat daerah tahun berikutnya.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna namun demikian dapat di gunakan sebagai pedoman dalam menyusun anggaran dalam rangka menjalankan misi untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang ada.

Baru, 25 Juli 2023



**ABUBAKAR S.Sos.M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c  
Nip. 19660816 198603 1 010



## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

1.1.	LATAR BELAKANG	1
1.2.	DASAR HUKUM PENYUSUNAN	3
1.3.	MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.4.	SISTEMATIKA PENULISAN	8

### BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BKAD TAHUN LALU

2.1	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2012 dan Capaian Renstra BKAD	9
2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah	28
2.3.	Isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah	32
2.4.	Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah	35
2.5.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	47

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Arah Kebijakan dari pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	48
3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja	48
3.3.	Program Dan Kegiatan	49

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKAD

### BAB V PENUTUP

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b>	Tabel Kegiatan dan Faktor Penyebab serta Kebijakan/Tindakan yang perlu diambil .....	16
<b>Tabel 2.2</b>	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan) Kabupaten Barru .....	19
<b>Tabel 2.3</b>	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah .....	32
<b>Tabel 2.4</b>	Identifikasi Masalah BKAD Kabupaten Barru .....	31
<b>Tabel 2.5</b>	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Barru .....	36
<b>Tabel 2.6</b>	Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2024 .....	47
<b>Tabel 3.1</b>	Tujuan dan Sasaran BKAD Kabupaten Barru .....	49
<b>Tabel 3.2</b>	Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 .....	59
<b>Tabel 4.1.</b>	Rencana Kerja Pendanaan BKAD Tahun 2024 .....	68





**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jln. Sultan Hasanuddin No. 82 Telp. (0427) 322285 Kode Pos 90711

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN BARRU**

Nomor : 06/ BKAD/ I / 2023  
TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN**  
**KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2024**

KEPALA BADAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap tahun Pemerintah Daerah harus menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 dapat berjalan dengan efektif, serta berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 4);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 3);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 nomor 1);
  12. Peraturan Bupati Kabupaten Barru Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Barru Nomor 27 Tentang Rencana Strategis Daerah Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024.**

**KESATU :** Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Barru Tahunn 2024 adalah dokumen perencanaan 1 (Satu) tahun yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan;



- KEDUA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Menunjuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Barru

Pada Tanggal : 06 Januari 2023



KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KAB. BARRU

**ABUBAKAR, S.Sos, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19660816 198603 1 010

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Barru (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Barru;
3. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Barru;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barru;
5. Peringgal

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru  
Nomor : 06 / BKAD/ I / 2023  
Tanggal : 06 Januari 2023

---

**Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024**

No	Jabatan	Kedudukan
1	Kepala Badan	Penanggung Jawab
2	Sekretaris	Ketua Tim
3	Bidang Perencanaan dan Anggaran	Anggota
4	Bidang Perbendaharaan	Anggota
5	Bidang Aset	Anggota
6	Bidang Akutansi	Anggota
7	Kasubag Penyusunan Program	Anggota
8	Kasubag Keuangan	Anggota
9	Kasubag Umum dan SDM	Anggota



KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KAB. BARRU

**ABUBAKAR, S.Sos,M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19660816 198603 1 010



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- 2) Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024;
- 3) Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang Petunjuk Penyajian Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Adapun proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari Enam Tahapan Utama yaitu:

1. Persiapan penyusunan
2. Penyusunan Rancangan Awal

3. Penyusunan Rancangan
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir dan
6. Penetapan Rencana Kerja

Selanjutnya untuk penyusunan rencana kerja dimulai dengan adanya:

1. Surat Sekertariat Daerah, Nomor: 000.7.2.4/07/Bapelitbangda Tanggal 03 Januari 2023 tentang, Permintaan Ranwal Renja Tahun 2024 dan Laporan Evaluasi Renja 2022

Yang menyampaikan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah kepada BAPELITBANGDA, sehingga Badan Keuangan dan Aset Daerah membentuk Tim Penyusun Renja yang kemudian bekerja menyusun Rencana Kerja dengan mengacu pada rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra-PD. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan.

RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Barru Nomor 10 Tahun 2023, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah.



Renja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal RKPD. Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKA dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Renja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Perangkat Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/provinsi.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang akan datang memuat kebijakan, program kegiatan dan Sub Kegiatan senantiasa disinergikan dan disinkronisasikan dengan dokumen perencanaan yaitu: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 dengan Visi dan Misi Barru Sebagai Daerah Maju Berlandaskan Kebersamaan dan Bernafaskan Keagamaan yang telah dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru tahun 2021-2026, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah berperan dalam mendukung Misi ke 6 Bupati Barru yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (Good And Clean Governance) Serta Layanan Publik Yang Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi.

## **1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN:**

Penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  9. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2000-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barru



- (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 13);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 3);
  28. Peraturan Bupati Barru Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 27);
  29. Peraturan Bupati Barru Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor 22).
  30. Peraturan Bupati Barru Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 (berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 Nomor 35);

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 adalah untuk menguraikan rencana program kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai, serta kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024

Sedangkan tujuan sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. Memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi;

- c. Menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- e. Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penulisan Rancangan Rencana Kerja adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah
- 3.3. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

##### **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA**

#### **BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN LALU**

##### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah**

Evaluasi dilakukan guna melihat sejauh mana pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan kemudian mengukur tingkat pencapaian dengan melihat kendala atau permasalahan yang terjadi untuk dicarikan solusi dan pemecahannya sehingga tujuan kegiatan dapat tercapai secara optimal sesuai dengan yang ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Barru Nomor 60 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru ( Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 61 )sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Barru Nomor 24 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 24) dengan program kegiatan dan Sub Kegiatan yang tertera pada tahun 2022 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan 12 Kegiatan dan 11 Sub Kegiatan;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 5 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan 1 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan;

Sasaran Program Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 untuk mendukung Sasaran Rencana Strategis (Renstra) antara lain:

1. Meningkatnya Kinerja Pemerintahan yang Akuntabel dan Pelayanan Publik yang Baik:
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:  
Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan
    1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Target 2 Dokumen;  
Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan



1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Target 50 Orang;

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Target 12 Pegawai;

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Target 1 Paket

2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Target 12 Laporan

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Target 2 Unit

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7 Jenis

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Target 12 Laporan

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 Laporan

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan Target 4 Unit

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan Target 10 Unit;

3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Target 1 Unit;

b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sub Kegiatan

1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Target 2 Dokumen;

2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Target 2 Dokumen;

3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD Target 2 Dokumen;
4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD Target 34 Dokumen;
5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD Target 34 Dokumen;
6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DKA- SKPD Target 34 Dokumen;
7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD Target 2 Dokumen
8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Target 2 Dokumen
9. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Target 12 Regulasi;
10. Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Target 64 Orang;

Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah  
Sub Kegiatan

1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Target 34 Dokumen;
2. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Target 34 Dokumen
3. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank Lembaga Keuangan Bukan Bank Target 34 Dokumen
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fisik Pihak Ketiga (PFK) Target 3 Laporan;
5. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Target 1 Dokumen
6. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Target 64 Orang

Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan

1. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Target 4 Dokumen;
2. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran 2 Laporan;
3. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Target 2 Dokumen
4. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Target 2 Dokumen

Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan

1. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Target 1 Laporan
2. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 1 Laporan
3. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Target 1 Laporan

Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

Sub Kegiatan

1. Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah Target 60 Dokumen
2. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Target 1 Dokumen
3. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Target 64 Orang;

c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Penyusunan Standar Harga 2 Dokumen
2. Penyusunan Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Dokumen



3. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 2 Dokumen
4. Penatausahaan Barang Milik Daerah 6 Laporan;
5. Inventarisasi Barang Milik Daerah 7 Laporan;
6. Pengamanan Barang Milik Daerah 1 Laporan;
7. Optimalisasi Penggunaan, Pemamfaatan, Pemindatanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Target 5 Dokumen
8. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Target 64 orang;

Realisasi Anggaran

Sub Kegiatan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Realisasi 44,07%;
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Realisasi 89,91%;
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Realisasi 59,83% ;
4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Realisasi 34,42%
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Realisasi 85,81%
6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Target 2 Unit Realisasi 21,24%
7. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Target Realiasi 73,89%
8. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Realisasi 0%
9. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan Realisasi 100%
10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan Realisasi 100%;
11. Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya 31,29;
12. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Realisasi 77,18%;
13. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 84,66%;
14. Kooordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD Realisasi 8,28%;

15. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD Realisasi 59,83%;
16. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD Realisasi 52,14%;
17. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DKA- SKPD Realisasi 92,12%;
18. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD Realisasi 85,11%
19. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Realisasi 83,64 %;
20. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Realisasi 73,78%;
21. Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Realisasi 0,80 %;
22. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Realisasi 82,13%;
23. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Suvervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Realisasi 33,55%;
24. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank Lembaga Keuangan Bukan Bank Realisasi 58,36%
25. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fisik Pihak Ketiga (PFK) Realisasi 49,68% ;
26. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Realisasi 50,74%
27. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Realisasi 25,41%
28. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 5,82%;

29. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran Realisasi 65,77%;
30. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Realisasi 94,30%;
31. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Realisasi 65,37%;
32. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran cicilan Pokok Bunga dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah Realisasi 89,91%;
33. Analisis Pencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Realisasi 99,82%;
34. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 57,56%;
35. Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah Realisasi 37,10%;
36. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Realiasi 38,40%;
37. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Realisasi 0,91%;
38. Penyusunan Standar Harga Realisasi 56,75%
39. Penyusunan Kebutuhan Barang Milik Daerah Realisasi 73,64%;
40. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Realisasi 66,02%;
41. Penatausahaan Barang Milik Daerah Realisasi 91,55%;
42. Inventarisasi Barang Milik Daerah Realisasi 66,47%;
43. Pengamanan Barang Milik Daerah Realisasi 32,83%;
44. Optimalisasi Penggunaan, Pemamfaatan, Pemindatangan, Pemusnahan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Realisasi 70,06%
45. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Realisasi 99,07%;



**TABEL 2.1**

Tabel Kegiatan dan Faktor Penyebab serta Kebijakan/Tindakan yang perlu diambil :

No.	NAMA KEGIATAN	FAKTOR PENYEBAB	KEBIJAKAN/TINDAKAN YANG PERLU DIAMBIL
1	2	3	4
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Secara keseluruhan tidak ada masalah dalam melengkapi instrumen pembuatan laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan instrumen dalam langkah-langkah teknis Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaporan tentang Mutasi Kenaikan pangkat dan Gaji Berkala termasuk tunjangan keluarga seiring terjadi keterlambatan dari masing PD sehingga tidak segera dapat dilakukan Penyesuaian</li> <li>2. Adanya Mutasi PNS dari luar Kabupaten yang tidak segera dilaporkan ke Bidang Perbendaharaan sehingga berakibat ketersediaan anggaran Belanja Gaji Pegawai</li> </ol>	<p>Dilakukan Koordinasi dan ketepatan waktu penyampaian terkait ketetapan SK Perubahan Gaji agar tidak terjadi keterlambatan dalam pembayaran yang tidak sesuai yang diterimakan</p> <p>Dilakukan koordinasi dengan instansi asal dari perhitungan</p>
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perencanaan Belum Epektif untuk mengikuti Bintek atau pelatihan dan Peserta Bintek atau pelatihan tidak sesuai dengan Bidang Koordinasi yang ada di OPD	Melakukan klasifikasi Bintek yang akan diikuti sebelum penyusunan RKA Membuat skala prioritas Bintek atau Pelatihan yang akan diikuti
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Secara keseluruhan tidak ada masalah dalam melengkapi instrumen kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan instrumen dalam langkah-langkah teknis Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Terkendala Oleh spek TKDN yang belum secara Nasional diadakan sehingga untuk pengadaan Barang agak sulit mendapatkannya	Melakukan klasifikasi Barang yang akan diadakan sesuai dengan spek TKDN yang di haruskan
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Secara keseluruhan tidak ada masalah dalam melengkapi instrumen Kegiatan Jasa Surat Menyurat dan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan instrumen dalam melengkapi instrument kegiatan jasa surat menyurat dan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Secara keseluruhan tidak ada masalah dalam Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Penyediaan instrumen dalam melengkapi instrument kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

8	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Sebagian Pendapatan yang belum dapat diprediksi khususnya dana-dana transfer pada awal penyusunan APBD</li> <li>2. Aplikasi SIPD yang penerapannya belum sempurna untuk penyusunan Rencana Anggaran Daerah</li> </ol>	<p>Melakukan Koordinasi apabila mungkin dan memakai alokasi Definitif Tahun lalu</p> <p>Melakukan Koordinasi dan Konsultasi secara berkala terhadap kendala dihadapi untuk pengaplikasian Aplikasi SIPD dalam penyusunan Rencana Anggaran Daerah</p>
9	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jadwal Waktu pencairan yang terlambat disebabkan karena kelengkapan berupa dokumen pencairan PD belum mencukupi</li> <li>2. Belum maksimalnya terhadap pola pengelolaan terhadap Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK-BLUD</li> </ol>	<p>Agar dilakukan penetapan jadwal dan kelengkapan Dokumen Pencairan PD menetapkan operator Aplikasi SIPD dan pengelola keuangan lainnya</p> <p>Dilakukannya Pola Pembinaan BLUD</p>
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Rekonsiliasi pendapatan dan belanja Perangkat Daerah sering terlambat tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan</li> <li>2. Pengisian Matriks terkait dengan penjelasan tentang laporan keuangan, aliran Kas dan Neraca Perangkat Daerah belum dapat disusun secara tepat waktu</li> <li>3. Aplikasi SIPD untuk penatausahaan keuangan yang belum sempurna</li> </ol>	<p>Melakukan Koordinasi dan Pengendalian bagi setiap PD untuk melakukan pencocokan perangkaan pendapatan dan belanja dibidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD</p> <p>Diberikan edaran tentang contoh pengisian matriks yang tepat dan melakukan rekonsiliasi antara SKPD dan Bidang Akuntansi</p> <p>Up-date, rekonsiliasi, koordinasi dengan Kementerian dalam Negeri terkait penatausahaan keuangan Daerah</p>
11	Pengelolaan Data dan Implementasi system informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Secara umum tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini namun dibutuhkan ketepatan waktu dalam penyusunan lampiran Perda tentang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	Melakukan Koordinasi dengan SKPD Penerima
12	Pengelolaan Barang Milik Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlalu banyak Data standar harga dengan jenis yang sama karena usulan dari SKPD yang berbeda</li> <li>2. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah belum optimal</li> <li>3. Pengelolaan Aset dari Inventarisasi, Pengamanan, Penggunaan, Pemamfaatan dan Pemusnahan Belum Optimal</li> </ol>	<p>Mengklasifikasi Standar harga yang telah diusulkan SKPD agar standar harga yang dibuat tidak berulang</p> <p>Pengusulan Perencanaan harus sesuai RKBMD</p> <p>Klasifikasi Aset yang belum teratur sehingga untuk Inventarisasi, Pengamanan, Penggunaan, Pemamfaatan dan Pemusnahan perlu dilakukan upaya dengan bekerjasama dengan Instansi terkait dan mengoptimalkan sumberdaya dalam pengelolaan aset</p>

**Tabel 2.2**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023  
(tahun berjalan) Kabupaten Barru**

Nama Perangkat Daerah: BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangk at Daerah tahun n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2)	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5		Unsur Penunjang Urusan Pemerintaha								
5	2	Keuangan								
5	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
5	2	1	2	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan, penggaran dan pelaporan hasil evaluasi kinerja BPKAD				



5	2	1	2	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	3 Dok	300%
5	2	1	2	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan dokumen keuangan BKAD								
5	2	1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	1	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN berkinerja baik								
5	2	1	2	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Diklat	7 Diklat	7 Diklat	7 Diklat	100%	7 Diklat	21 Diklat	300%
5	2	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan Prasarana BPKAD yang tersedia								
5	2	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis	9 Jenis	300%
5	2	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	300%
5	2	1	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterpenuhan BMD penunjang kelancaran urusan pemerintahan								
5	2	1	2	7	10	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor								

							atau Bangunan Lainnya yang Disediakan												
5	2	1	2	7	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	6 Unit					300%
5	2	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan												
5	2	1	2	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100%	4 Jenis	12 Jenis					300%
5	2	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	35 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	100%	35 Orang	105 Orang					300%
5	2	1	2	9															
5	2	1	2	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	23 Unit	23 Unit	23 Unit	100%	23 Unit	69 Orang					300%
5	2	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	23 Unit	23 Unit	23 Unit	100%	23 Unit	69 Orang					300%

5	2	1	2	9	10	Pemeliharaan dan Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	100%	1 Gedung	3 Gedung	300%
5	2	2				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH									
5	2	2	2			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase keterpenuhan Dokumen Anggaran Daerah yang disahkan Tepat Waktu								
5	2	2	2	1	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dok	300%
5	2	2	2	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	3 Dok	300%
5	2	2	2	1	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 SKPD	44 SKPD	44 SKPD	44 SKPD	100%	44 SKPD	132 SKPD	300%
5	2	2	2	1	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 SKPD	44 SKPD	44 SKPD	44 SKPD	100%	44 SKPD	132 SKPD	300%
5	2	2	2	1	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DKA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	44 SKPD	44 SKPD	44 SKPD	44 SKPD	100%	44 SKPD	132 SKPD	300%
5	2	2	2	1	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DKA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	44 SKPD	44 SKPD	44 SKPD	44 SKPD	100%	44 SKPD	132 SKPD	300%
5	2	2	2	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	6 Dok	300%





							Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya								
5	2	2	2	2	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	98 SKPD	98 SKPD	98 SKPD	98 SKPD	100%	98 SKPD	294 SKPD	300%
5	2	2	2	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	9 Laporan	300%

5	2	2	2	2	10	Penyusunan Petunjuk Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	3 Dok	300%
5	2	2	2	2	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300%
5	2	2	2	3		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase keterpenuhan pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah								
5	2	2	2	3	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	4 Dok	12 Dok	300%
5	2	2	2	3	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	6 Dok	300%
5	2	2	2	3	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	6 Dok	300%

						tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Daerah tentang Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota								
5	2	2	2	3	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 DOK	1 DOK	1 DOK	1 DOK	100%	1 DOK	3 Dok	300%
5	2	2	2	4		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah									300%
5	2	2	2	4	4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300%
5	2	2	2	4	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Perbup	1 Perbup	1 Perbup	1 Perbup	100%	1 Perbup	3 Perbup	300%
5	2	2	2	4	9	Pengelolaan Dana Darurat Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Perbup	1 Perbup	1 Perbup	1 Perbup	100%	1 Perbup	3 Perbup	300%





							Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah**

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

- a. Menyiapkan bahan petunjuk teknis penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Menyiapkan rancangan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Menyiapkan Surat penyediaan Dana (SPD) dan registernya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Melakukan pencatatan register Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- e. Melakukan pengelolaan Belanja Pegawai;
- f. Menyediakan data alokasi kebutuhan gaji PNS dan menghimpun laporan pelaksanaannya;
- g. Melakukan pemeriksaan dan meneliti surat permintaan pembayaran gaji, pensiun serta tunjangan lainnya;
- h. Menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan belanja pegawai;
- i. Menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji untuk pensiun, meninggal dunia serta mutasi;
- j. Mengkoordinasikan dan mengajukan kekurangan gaji, kenaikan tingkat, pangkat, berkala, uang duka wafat, serta usulan gaji yang diajukan oleh masing-masing Perangkat Daerah;
- k. Menyajikan cetak data gaji Perangkat Daerah;
- l. Menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Dana Perimbangan;
- m. Menguji kebenaran berkas pengajuan Surat Permintaan Pembayaran
- n. SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) atas Keputusan Otorisasi;
- o. Mempersiapkan bahan pertimbangan pelaksanaan penyelesaian masalah perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

Untuk mengevaluasi Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru dengan mengukur capaian kinerja dengan menggunakan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah yaitu:

1. Meningkatnya kualitas penerapan/implementasi SAKIP BKAD.
2. Meningkatnya Kinerja Pemerintahan yang Akuntabel dan Pelayanan Publik yang Baik.

Sasaran strategis diatas diukur dengan mengukur nilai SAKIP BKAD berdasarkan LHE Inspektorat dan WTP yang diberikan oleh BPK dan Opini BPK merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan didasarkan pada 4 kriteria yang terdiri dari:

1. Kesesuaian dengan standard Akuntansi Pemerintahan
2. Kecukupan Pengungkapan
3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
4. Efektifitas Sistem Pengendalian Internal

Persentase Penyajian Laporan Keuangan yang sesuai standard Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan formula Jumlah Laporan Keuangan yang sudah direkon banding dengan jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yaitu Laporan Keuangan yang sesuai ketentuan dapat mempercepat penyusunan Raperda APBD dengan tepat waktu.

Persentase PD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan dengan formula jumlah laporan keuangan yang tepat waktu banding dengan jumlah laporan keuangan PD. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dari kompilasi laporan Keuangan PD yang telah terintegrasi dalam system informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2019 telah selesai dan sedang diaudit BPK RI dengan harapan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dapat dipertahankan.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/PMK.07/2015 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Tunai, Bidang Akuntansi dan Pelaporan telah memenuhi permintaan berupa data Laporan Realisasi APBD bulanan yang nantinya tiap bulan harus diupload di website resmi Kementerian Keuangan bersamaan dengan data Perkiraan Belanja Operasi dan Belanja Modal Bulanan dari Bidang Anggaran dan Data Posisi Kas Bulanan dari Bidang Perbendaharaan. Diperlukan dukungan data entry pendapatan dari Perangkat Daerah penghasil dalam memenuhi PMK 235/PMK.07/2015, sehingga untuk realisasi pendapatan diperlukan waktu yang sedikit lebih lama dibanding data entry realisasi belanja yang secara otomatis bisa terkoneksi dari Bidang Perbendaharaan.

Dalam Pelaksanaan Standar Akuntansi Berbasis Akrual dalam Penyusunan, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barru masih kurangnya Sumber Daya Aparatur yang kompeten dan handal

dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Barru. Uraian di atas dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini:



**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK/IKU	Target Renstra BKAD Tahun				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2024	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Reformasi Birokrasi BPKAD			CC	CC	B	B			B	B	
2	Nilai SAKIP BPKAD			CC	CC	B	B	B		B	B	
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah			73,94	75,64	76,45	77,64			76,45	77,64	
4	Opini BPK			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		WTP	WTP	

### 2.3 Isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru sebagai berikut:

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Keuangan dan Aset berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

**Tabel 2.4**  
**Identifikasi Masalah BKAD Kabupaten Barru**

No	Permasalahan	Solusi
1	Rendahnya kualitas pengurus barang perangkat daerah dalam melakukan penatausahaan barang milik daerah	Pemberian bimbingan teknis dan sosialisasi kepada pengurus barang seluruh PD serta pemberian reward antara lain berupa honorarium
2	Lemahnya koordinasi antara Pegawai yang menagai keuangan, melaksanakan pengadaan dengan pengurus barang yang berakibat pada minimnya informasi yang didapatkan oleh pengurus barang dalam rangka pengisian data aset	Rekonsiliasi secara periodik antara pihak yang terkait, pengurus barang seluruh PD, dan BKAD dalam rangka pemutakhiran data SIMDA BMD
3	Penyimpanan dokumen perolehan aset yang masih belum tertib yang berakibat pada sulitnya melacak asal perolehan, tahun perolehan dan nilai perolehan	Berkoordinasi dengan pihak yang menyediakan aplikasi software agar menambahkan menu scan file dokumen perolehan aset. Agar softcopy dokumen peroleh dapat tersimpan dalam aplikasi SIMDA BMD
4	Penatausahaan Mutasi Barang Milik daerah yang tidak tertib	Kepala Perangkat Daerah segera mengajukan usulan persetujuan pengalihan BMD apabila terjadi mutasi barang daerah yang terjadi di instansinya
5	Perangkat daerah dalam melakukan inventarisasi, pencatatan dan pelaporan aset pada Kartu Inventaris Barang tidak tertib dan kurang cermat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masing-masing Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna barang agar menginstruksikan pengurus barang melakukan inventarisasi barang milik daerah minimal 1 kali dalam lima tahun kemudian hasilnya divalidasi dan dimutakhirkan pada SIMDA BMD</li> <li>• Pengurus barang seluruh PD agar lebih cermat dalam melakukan pengisian informasi dan pemutakhiran data dalam SIMDA BMD terkait kondisi barang, nilai dan rincian barang</li> </ul>
6	Masih terdapat selisih/perbedaan antara jumlah BPKB yang disampaikan oleh Perangkat Daerah dengan fisik BPKB yang tersimpan di BKAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Perangkat Daerah agar menyerahkan BPKB yang masih disimpan di instansinya kepada Pengelola Barang melalui pembantu Pengelola barang/BKAD dengan disertai dokumen tanda terima</li> <li>• Perlu dilaksanakan kegiatan rekonsiliasi antara Pengurus Barang dengan BKAD dalam melakukan validasi dan pemutakhiran data KIB B secara periodik untuk menelusuri selisih data kendaraan yang tercatat di SIMDA BMD, fisik kendaraan di PD dan fisik BPKP yang tercatat di PD dan BKAD</li> </ul>

7	Penatausahaan dan pengelolaan aset lainnya / rusak masih belum tertib	Membentuk Tim Teknis untuk memverifikasi dan memvalidasi aset yang rusak berat agar diusulkan kepada Bupati untuk dihapuskan
8	Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain belum tertib	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan inventarisasi serta melengkapi dokumen pemanfaatan atas BMD yang dimanfaatkan oleh pihak lain</li> <li>• Melakukan monitoring secara periodik atas jangka waktu pemanfaatan BMD dimaksud</li> </ul>
9	Penatausahaan nomor register dan Kodefikasi Barang Milik Daerah tidak tertib	Seluruh Kepala Perangkat Daerah agar menginstruksikan pengurus barang untuk menertibkan nomor register, kode lokasi serta memasang nomor register pada fisik aset tetap untuk pengamanan
10	Kapitalisasi belum dilaksanakan sepenuhnya oleh perangkat daerah	Kepala Perangkat Daerah yang belum melaksanakan kapitalisasi aset agar menginstruksikan pengurus barang untuk melakukan penelusuran atas induk aset dan anak aset agar dapat melakukan proses kapitalisasi aset
11	Terhambatnya proses pengalihan status penggunaan barang milik daerah perangkat daerah yang merger, gabung dan pisah yang disebabkan:	
	a. Calon Pengguna Barang baru belum menyerahkan surat pernyataan kesediaan menerima barang	a. Koordinasi dengan pengguna barang baru agar segera menyerahkan surat pernyataan kesediaan menerima barang
	b. Usulan Data BMD dari Pengguna Barang Lama yang tidak sesuai dengan data SIMDA	b. BKAD melakukan rekonsiliasi dengan pengurus barang, dan pengguna barang lama agar melakukan perbaikan data
	c. Terdapat BMD yang tidak ada Perangkat Daerah yang mau menerima pengalihannya	c. Menghimpun dan mencatat data BMD yang tidak diterima oleh calon pengguna barang baru

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan suatu dokumen perencanaan perangkat daerah yang erat kaitannya dengan proses yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun, bagaimana yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Dengan perencanaan strategis diharapkan dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Barru dengan Visi Kabupaten Barru Sebagai Daerah Maju Berlandaskan Kebersamaan dan Bernafaskan Keagamaan.

Memperhatikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Barru sebagaimana yang tersirat pada RPJMD Kabupaten Barru tersebut, BKAD sebagai unsur staf mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan

kebijakan daerah yang bersifat spesifik, yaitu di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Berdasarkan Renja tersebut terdapat faktor penghambat dan pendorong penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi BKAD. Program Pembangunan pada misi ke 6 (Enam) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good And Clean Governance) Serta Layanan Publik yang Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi, Badan Keuangan dan Aset Daerah berkomitmen untuk mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Misi tersebut diatas dijabarkan dalam program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

#### TELAAHAN KINERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Faktor-Faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah (PD) yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD jika ditinjau dari sasaran Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk tahun 2023:

Faktor Penghambat:

1. Adanya sebagian aset Pemerintah Kabupaten Barru yang riwayat perolehannya masih belum jelas
2. Sering terjadinya keterlambatan penyampaian pelaporan keuangan dari PD

Faktor Pendorong

1. Melakukan penelusuran inventarisasi identifikasi dan konsolidasi dengan PD sebagai pengguna barang
2. Perangkat Daerah dengan sistem website online dengan sistem pengelolaan keuangan yang terpusat dan dibuat secara online

#### PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Upaya keras yang baik berdampak pada efisiensi pengelolaan keuangan

- a) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik internal maupun eksternal agar dapat memberikan informasi yang lebih cepat dan tepat;
- b) Diharapkan dalam penyusunan APBD dan penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LKD) dapat tepat waktu;

- c) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik internal maupun eksternal agar dapat memberikan informasi yang lebih cepat dan tepat;
- d) Profesionalisme dan disiplin aparatur daerah, kemampuan memfasilitasi, melayani dan bahkan mencari solusi juga merupakan faktor yang penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan berkelanjutan
- e) Kurang siapnya PD dalam penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual;

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah**

Pada tabel 2.3 ini disajikan perbandingan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dengan analisis kebutuhan, alasan proses dilakukan dan temuan/catatan penting perbedaan. Saat ini Dalam Pagu indikatif pada RKPD sebagian besar sudah sesuai dengan Dana Analisis Kebutuhan. Tetapi ada beberapa yang belum sesuai antara lain karena:

- Lebih disesuaikan dengan kebutuhan /kondisi riil saat ini.
- Beberapa kegiatan yang kurang prioritas dilakukan pengurangan karena Dana Transfer dari Pusat dibatasi/dikurangi.



**Tabel 2.5**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**  
**Kabupaten Barru**

Rancangan Awal RKPD (Renstra 2024 / RKPD 2024 Perkiraan Maju 2025)						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
1	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	4	3	5	6	8	10	9	11	12	14
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	6,241,474,248	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	9,427,745,701	
I	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan, penggaran dan pelaporan hasil evaluasi kinerja BKAD		2,820,500	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan, penggaran dan pelaporan hasil evaluasi kinerja BPKAD		2,910,000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,820,500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,910,000	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase keterpenuhan dokumen keuangan BKAD		4,984,430,048	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase keterpenuhan dokumen keuangan BKAD		7,596,128,788	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	4,984,430,048	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	7,596,128,788	

Rancangan Awal RKPD (Renstra 2024 / RKPD 2024 Perkiraan Maju 2025)						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
1	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	4	3	5	6	8	10	9	11	12	14
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase ASN berkinerja baik		89,276,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase ASN berkinerja baik		150,882,000	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan Fungsi	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Diklat	89,276,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan Fungsi	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Diklat	150,882,000	
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah sarana dan Prasarana BPKAD yang tersedia	100%	242,758,500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah sarana dan Prasarana BPKAD yang tersedia	100%	290,138,645	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Jenis	3,845,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Jenis	3,845,000	
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	12 Jenis	8,021,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	12 Jenis	7,179,375	

3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	230,892,500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	279,114,270	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase keterpenuhan BMD penunjang kelancaran urusan pemerintahan	4 Jenis	516.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase keterpenuhan BMD penunjang kelancaran urusan pemerintahan		938.457.512	
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	2 Unit	482.400.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	2 Unit	40.000.000	
2	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		34.100.000	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan		306.189.200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan		384.728.756	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Jenis	306.189.200	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Jenis	384.728.756	

Rancangan Awal RKPD (Renstra 2024 / RKPD 2024 Perkiraan Maju 2025)						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
1	Program / Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	4	3	5	6	8	10	9	11	12	14
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah			99.500.000		Badan Keuangan dan Aset Daerah			64.500.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemerintah Kabupaten Barru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	40,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemerintah Kabupaten Barru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	40,000,000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	9,500,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	9,500,000	
3	Pemeliharaan dan Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Pemerintah Kabupaten Barru	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	Pemeliharaan dan Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Pemerintah Kabupaten Barru	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15,000,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				102,801,831,487	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				113,576,943,644	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase keterpenuhan Dokumen Anggaran Daerah yang disahkan Tepat Waktu		1,416,959,000	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase keterpenuhan Dokumen Anggaran Daerah yang disahkan Tepat Waktu		2,348,794,121	

1	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	4	3	5	6	8	10	9	11	12	14
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	40,910,000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	44.604.681	
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	34.647.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	31,193,967	
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 SKPD	5.941.500	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 SKPD	8,907,637	
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 SKPD	6,056,500	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 SKPD	6,995,889	
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	44 SKPD	6.459.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	44 SKPD	19.379.306	
6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DKA-SKPD	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	44 SKPD	6.347.500	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DKA-SKPD	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	44 SKPD	19.379.306	
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	357.401.00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	821.124.835	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
1	Program / Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	4	3	5	6	8	10	9	11	12	14
8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	406.942.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	445.037.605	
9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	10 Regulasi	353.634.500	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	10 Regulasi	600.000,000	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	6.347.500	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	6.347.500	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	6.347.500	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	6.347.500	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	6.347.500	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	6.347.500	
10	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jenis Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah	2 Kegiatan	179.577.500	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jenis Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah	2 Kegiatan	330.128.394	



	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Rata - rata Waktu Penerbitan Dokumen Administrasi Pengeluaran Kas	100%	348.925.000	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Rata - rata Waktu Penerbitan Dokumen Administrasi Pengeluaran Kas	100%	453.677.241	
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	44 SKPD	260.691.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	44 SKPD	328,227,300	
2	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	7 Kegiatan	47.092.000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	7 Kegiatan	49.469.941	
3	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	98 SKPD	10.742.000	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	98 SKPD	42.080.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam	3 Laporan	30.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam	3 Laporan	33,900,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
1	Program / Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	4	3	5	6	8	10	9	11	12	14
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase keterpenuhan pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	595.371.300	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase keterpenuhan pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	945.034.113	
1	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan-LO dan Beban	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 Dokumen	28.307.000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan-LO dan Beban	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 Dokumen	42.470.846	
2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulan dan Semesteran	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	2 Laporan	33.462.500	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulan dan Semesteran	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	2 Laporan	48.882.805	
3	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	2 Dokumen	354.024.300	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	2 Dokumen	674.102.961	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
1	Program / Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	4	3	5	6	8	10	9	11	12	14
4	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	179,577,500	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	179.577.500	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah		100%	100,145,105,187					109,829,438,168	
1	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	3,191,298,036	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	3,000,000,000	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	40 Desa	91.788.792.151	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	40 Desa	100.000.000.000	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Kegiatan	5.165.015.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Kegiatan	6.000.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
1	Program / Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	4	3	5	6	8	10	9	11	12	14
	Pengelolaan Data Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkungan Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah			295,471,000	Pengelolaan Data Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkungan Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah			414.719.084	
	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	60 Laporan	86.231.500	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	60 Laporan	68.387.934	
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan	1 Kegiatan	130.222.500	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan	1 Kegiatan	138.532.460	
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	12 Bulan	79.017.000	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	12 Bulan	207.798.690	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan ketersediaan data aset yang akurat		779.187.550	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan ketersediaan data aset yang akurat		1.135.097.435	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD	Jenis Barang Milik Daerah yang dikelola	7 Jenis	779.187.550	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD	Jenis Barang Milik Daerah yang dikelola	7 Jenis	1.135.097.435	
1	Penyusunan Standar Harga	BKAD	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	134.041.000	Penyusunan Standar Harga	BKAD	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	43.070.495	

Rancangan Awal RKPD (Renstra 2024 / RKPD 2024 Perkiraan Maju 2025)						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
1	Program / Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	4	3	5	6	8	10	9	11	12	14
2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	3.563.650	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	5,617.619	
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Perbup	44.614.000	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Perbup	25.746.864	
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	243.880.700	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	417.484.388	
4	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	7 Laporan	83.805.200	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	7 Laporan	68.488.602	
5	Pengamanan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	30 Sertifikat dan 20 BPKB	63.738.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	30 Sertifikat dan 20 BPKB	133.285.130	
6	Optimalisasi Penggunaan Pemamfaatan, Pemindahtanganan Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Peggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	99.413.000	Optimalisasi Peggunaan Pemamfaatan, Pemindahtanganan Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Peggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	150.067.921	
	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	17.863.500	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	17.863.500	
7	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	36 Entitas	88.268.500	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	36 Entitas	273.472.917	
			Jumlah		109.822.493.285					124,139,786,779	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada kegiatan Musrenbang yang telah diadakan oleh Badan Perencanaan Kabupaten Barru belum ada usulan program/kegiatan dari masyarakat yang ditujukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru seperti yang ditera pada tabel 2.6 dibawah ini:

**Tabel 2.6**  
**Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2024**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
NIHIL					



### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Arah Kebijakan dari pada Badan Keuangan dan Aset Daerah** adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia;
- b. Meningkatkan disiplin dan kesejahteraan;
- c. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Aset/Barang Daerah yaitu inventarisasi Asset Daerah guna penilaian dalam rangka penyajian dalam Neraca yang sesuai dengan kondisi serta pengamanan Aset Daerah dengan Sertifikasi Aset sehingga terwujud kepastian kepemilikan.
- d. Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Daerah yaitu Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Arus Kas serta Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Kabupaten Barru yang mendapatkan opini BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

##### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja**

Pada dasarnya tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah keinginan untuk mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki lima pilar utama yaitu Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan berkarakter.

Adapun Tujuan yang ingin dicapai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru 2021 - 2026 dalam merealisasikan Visi dan Misi Kepala Daerah adalah:

1. Mewujudkan reformasi birokrasi di lingkup BPKAD
2. Meningkatkan manajemen pemerintahan yang melayani baik dan bersih.

Adapun Sasaran Tujuan yang ingin dicapai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru 2021 – 2026 adalah :

1. Meningkatnya kualitas penerapan/implementasi SAKIP BPKAD.
2. Meningkatnya Kinerja Pemerintahan yang Akuntabel dan Pelayanan Publik yang Baik.

Rumusan tujuan dan sasaran beserta target kinerja pembangunan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru pada tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah**  
**Kabupaten Barru Tahun 2024**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan/Sasaran</b>	<b>Target Kinerja</b>
Mewujudkan reformasi birokrasi di lingkup BPKAD		Indeks Reformasi Birokrasi BPKAD	<b>B</b>
	Meningkatnya kualitas penerapan/implementasi SAKIP BPKAD.	Nilai SAKIP BPKAD	<b>B</b>
Meningkatkan manajemen pemerintahan yang melayani baik dan bersih.		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	<b>76,45</b>
	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan yang Akuntabel dan Pelayanan Publik yang Baik.	Opini BPK	<b>WTP</b>

### **3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.3.1 Faktor – Faktor Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan**

Rumusan Program dan Kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan awal RKPD dengan adanya penambahan sub kegiatan pada program Pengelolaan Keuangan Daerah kegiatan penunjang urusan kewenangan Pengelolaan keuangan Daerah pada sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat mendesak dianggap perlu untuk persiapan mengcover kegiatan yang dianggap akan terlaksana seperti penanganan Covid-19 walaupun sekarang kita sudah tidak dalam kondisi Pandemi namun dalam kondisi Endemi ini kita masih dalam kekhawatiran akan paparan penyakit yang disebabkan Virus, bencana alam yang tidak terduga penanganannya juga dalam Sub kegiatan Bantuan Tidak Terduga, begitupun dengan Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah dan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dianggap perlu untuk mengcover amanat dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai kontrol dalam penatausahaan Aset sehingga perlu melaksanakan Koordinasi dalam bentuk rekonsiliasi dan penilaian Barang begitupun dengan keterlibatan APH (Aparat Penegak Hukum) dalam hal ini Kejaksaan Negeri sebagai Partner dalam Penatausahaan Aset di Kabupaten Barru.

#### **3.3.2 Uraian Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan**

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Barru, maka pada tahun 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru melaksanakan 3 (Tiga) program dan 13 (Tiga Belas) kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

## 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Dengan kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan
    1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan
    1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan
    1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan
    1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Sub Kegiatan
    1. Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya
    2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan
    1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan
    1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
    3. Pemeliharaan dan Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

## 2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dengan Kegiatan:

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

- Sub Kegiatan
  1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
  2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
  3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
  4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
  5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DKA-SKPD
  6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DKA-SKPD
  7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
  8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD
  9. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran
  10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
  11. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
  12. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
  13. Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
- 2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
  - Sub Kegiatan
    1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
    2. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
    3. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
    4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
  - Sub Kegiatan
    1. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan-LO dan Beban
    2. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulan dan Semesteran
    3. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran  
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

4. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan  
Keuangan Pemerintah Daerah

4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- Sub Kegiatan

1. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran cicilan Pokok  
dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
2. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
3. Pengelolaan Dana Darurat Mendesak

### 3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Dengan Kegiatan

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Sub Kegiatan

1. Penyusunan Standar Harga
2. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
3. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Penatausahaan Barang Milik Daerah
5. Inventarisasi Barang Milik Daerah
6. Pengamanan Barang Milik Daerah
7. Optimalisasi Penggunaan Pemamfaatan, Pemindahtanganan  
Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
8. Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik  
daerah
9. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah  
Kabupaten/Kota

#### **3.3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**

Rumusan rencana program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset  
Daerah Tahun 2024 dan perkiraan maju Tahun 2025 disajikan pada tabel  
berikut :

**Tabel 3.2**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju tahun 2025 Kabupaten Barru**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKONING PEMUTAKHIRAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Targ et Akhir Periode Rens tra OPD	Reali sasi Capaian RENJ A OPD Tahun 2022	Praki raan Capaian Targe t RENJ A OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Cata tan Pent ing	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUN GJAWAB
									Lok asi	Target Kinerja	Kebutuha n Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sum ber Dana		Target Kinerja	Kebutuha n Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	URUSAN PENUNJANG															
5	KEUANGAN															
5	0201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP BKAD				BK AD	3,00	6.241.474.248			4,00	9.427.745.701	BKAD
		Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	5001	Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan					BK AD	20 JPL				20 JPL		
5	0201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5002	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan, penggaran dan pelaporan hasil evaluasi kinerja BPKAD				BK AD	100%	2.820.500	APB D		100%	2.910.000	BKAD
5	0201	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5002	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan				BK AD	1 Dok	2.820.500	APB D		1 Dok	2.910.000	BKAD
5	0201	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5002	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan dokumen keuangan BPKAD				BK AD	100%	4.984.430.048	APB D		100%	7.596.128.788	BKAD
5	0201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5002	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan				BK AD	100%	4.984.430.048	APB D		100%	7.596.128.788	BKAD

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Targ et Akhir Periode Rens tra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Praktis Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Cata tan Pent ing	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUN GJAWAB
									Lok asi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sum ber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50201205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN berkinerja baik	50201205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN berkinerja baik				BKAD	100%	89.276.000	APBD		100%	150.882.000	BKAD
502012059	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	50201209	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	28 Diklat	7 Diklat	7 Diklat	BKAD	7 Diklat	89.276.000	APBD		7 Diklat	150.882.000	BKAD
50201206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan Prasarana BPKAD yang tersedia	50201206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan Prasarana BPKAD yang tersedia				BKAD	100%	242.758.500	APBD		100%	290.138.645	BKAD
502012061	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	50201201	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	BKAD	3 Jenis	3.845.000	APBD		3 Jenis	3.845.000	BKAD
502012063	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	50201203	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	BKAD	12 Jenis	8.021.000	APBD		12 Jenis	7.179.375	BKAD
502012069	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	50201209	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	BKAD	12 Bulan	230.892.500	APBD		12 Bulan	279.114.270	BKAD
50201207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterpenuhan BMD penunjang kelancaran urusan pemerintahan	50201207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterpenuhan BMD penunjang kelancaran urusan pemerintahan				BKAD	100%	516.500.000	APBD		100%	938.457.512	BKAD



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Targ et Akhir Periode Rens tra OPD	Reali sasi Capaian RENJ A OPD Tahun 2022	Praki raan Capaian Targ et RENJ A OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Cata tan Pent ing	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUN GJAWAB
									Lok asi	Target Kinerja	Kebutuha n Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sum ber Dana		Target Kinerja	Kebutuha n Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5020120701	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	502012100	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	12 Unit	0 Unit	0 Unit	BK AD	2 Unit	482.400.000	APB D		2 Unit	40.000.000	BKAD
5020120711	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	502012111	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	5 Unit	BK AD	-	34.100.000	APB D		-	-	BKAD
50201208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	5020121	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan				BK AD		306.189.200	APB D			384.728.756	BKAD
5020120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis jasa surat menyurat yang disediakan	502012101	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	BK AD	4 Jenis	306.189.200	APB D		4 Jenis	384.728.756	BKAD
50201209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		50201211	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					BK AD		99.500.000				64.500.000	BKAD
5020120901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara	502012101	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	5 Unit	5 Unit	BK AD	4 Unit	40.000.000	APB D		24 Unit	40.000.000	BKAD

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Targ et Akhir Periode Rens tra OPD	Reali sasi Capaian RENJ A OPD Tahun 2022	Praki rraan Capaian Targ et RENJ A OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Cata tan Pent ing	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUN GJAWAB
									Lok asi	Target Kinerja	Kebutuha n Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sum ber Dana		Target Kinerja	Kebutuha n Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5 0 2 0 1 2. 09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 0 2 0 1 2, 1 00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	5 Unit	5 Unit	BK AD	24 Unit	9.500.000	APB D		24 Unit	9.500.000	BKAD
5 0 2 0 1 2. 09 1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Sarana dan Prasarana Gedung kantor yang dipelihara	5 0 2 0 1 2, 1 00 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	BK AD	1 Unit	50.000.000	APB D		1 Unit	15.000.000	BKAD
5 0 2 0 2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan RKA Tepat Waktu	5 0 2 0 2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan RKA Tepat Waktu				BK AD	100%				100%		
		Persentase Realisasi Pengeluaran Kas Daerah Terhadap Realisasi Penerimaan Kas Daerah			Persentase Realisasi Pengeluaran Kas Daerah Terhadap Realisasi Penerimaan Kas Daerah					100%	102.801.831.487	APB D		100%	113.576.943.644	BKAD
		Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Ke BPK RI Tepat Waktu			Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Ke BPK RI Tepat Waktu					100%				100%		
		Persentase Penetapan perda APBD Tepat Waktu			Persentase Penetapan perda APBD Tepat Waktu					100%				100%		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Targ et Akhir Periode Rens tra OPD	Reali sasi Capaian RENJ A OPD Tahun 2022	Praki raa n Capaian Targ et RENJ A OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Cata tan Pent ing	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUN GJAWAB
									Lok asi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sum ber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50202.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase keterpenuhan Dokumen Anggaran Daerah yang disahkan Tepat Waktu	50202.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase keterpenuhan Dokumen Anggaran Daerah yang disahkan Tepat Waktu				BKAD	100%	1.416.959.000	APBD		100%	2.348.794.121	BKAD
50202.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disepakati tepat waktu	50202.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	9 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	BKAD	2 Dok	40.910.000	APBD		2 Dok	44.604.681	BKAD
50202.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUA Perubahan dan PPAS Perubahan yang disepakati tepat waktu	50202.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	BKAD	1 Dok	34.647.000	APBD		1 Dok	34.193.967	BKAD
50202.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang telah diverifikasi dan disetujui	50202.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 SKPD	44 SKPD	44 SKPD	BKAD	44 SKPD	5.941.500	APBD		44 SKPD	8.907.637	BKAD
50202.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang telah diverifikasi dan disetujui	50202.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 SKPD	44 SKPD	44 SKPD	BKAD	44 SKPD	6.056.500	APBD		44 SKPD	6.995.889	BKAD
50202.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang telah diverifikasi dan disetujui	50202.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	44 SKPD	44 SKPD	44 SKPD	BKAD	44 SKPD	6.459.000	APBD		44 SKPD	19.379.306	BKAD
50202.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang telah diverifikasi dan disetujui	50202.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	44 SKPD	44 SKPD	44 SKPD	BKAD	44 SKPD	6.347.500	APBD		44 SKPD	19.379.306	BKAD

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Targ et Akhir Perio de Rens tra OPD	Reali sasi Capai an RENJ A OPD Tahu n 2022	Praki raan Capai an Targe t RENJ A OPD Tahu n 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Cata tan Pent ing	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUN GJAWAB
									Lok asi	Target Kinerj a	Kebutuha n Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sum ber Dana		Target Kinerj a	Kebutuha n Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5 0 2 0 2 0 1 7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda dan Perkada APBD yang ditetapkan tepat waktu	5 0 2 0 2 0 1 0 7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	5 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	BK AD	2 Dok	357.401.0 00	APB D		2 Dok	821.124.8 35	BKAD
5 0 2 0 2 0 1 8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda dan Perkada APBD Perubahan yang ditetapkan tepat waktu	5 0 2 0 2 0 1 0 8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	5 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	BK AD	2 Dok	406.942.0 00	APB D		2 Dok	445.037.6 05	BKAD
5 0 2 0 2 0 1 9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi tentang kebijakan Anggaran yang tersusun dan ditetapkan	5 0 2 0 2 0 1 0 9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	54 Regul asi	10 Regul alsi	10 Regul asi	BK AD	10 Regula si	353.634.5 00	APB D		10 Regula si	600.000.0 00	BKAD
5 0 2 0 2 0 1 0	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Perencanaan Anggaran Pendapatan	5 0 2 0 2 0 1 0 10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	5 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	BK AD	1 Dok	6.347.500	APB D		1 Dok	6.347.500	BKAD
5 0 2 0 2 0 1 1	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	5 0 2 0 2 0 1 0 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	5 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	BK AD	1 Dok	6.347.500	APB D		1 Dok	6.347.500	BKAD

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Targ et Akhir Perio de Rens tra OPD	Reali sasi Capaian RENJ A OPD Tahun 2022	Praki raa n Capaian Targe t RENJ A OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Cata tan Pent ing	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUN GJAWAB
									Lok asi	Target Kinerja	Kebutuha n Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sum ber Dana		Target Kinerja	Kebutuha n Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5 0 2 0 2 01 1 2	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Perencanaan Anggaran Pembiayaan	5 0 2 0 2 01 00 12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	5 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	BK AD	1 Dok	6.347.500	APB D		1 Dok	6.347.500	BKAD
5 0 2 0 2 01 1 3	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jenis Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah	5 0 2 0 2 01 00 13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	5 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	BK AD	2 Kegiat an	179.577.500	APB D		2 Kegiat an	330.128.394	BKAD
5 0 2 0 2 02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rata - rata Waktu Penerbitan Dokumen Administrasi Pengeluaran Kas	5 0 2 0 2 02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rata - rata Waktu Penerbitan Dokumen Administrasi Pengeluaran Kas	5 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	BK AD	100%	348.925.000	APB D		100%	453.677.241	BKAD
5 0 2 0 2 02 0 1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Yang Diterbitkan	5 0 2 0 2 02 00 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	44 SKPD	44 SKPD	44 SKPD	BK AD	44 SKPD	260.691.000	APB D		44 SKPD	328.227.300	BKAD
5 0 2 0 2 02 0 5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5 0 2 0 2 02 00 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	35 Kegiat an	7 Kegiat an	7 Kegiat an	BK AD	7 Kegiat an	47.092.000	APB D		7 Kegiat an	49.469.941	BKAD

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Targ et Akhir Perio de Rens tra OPD	Realisasi Capaian RENJ A OPD Tahun 2022	Praktis Capaian Target RENJ A OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Cata tan Pent ing	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUN GJAWAB
									Lok asi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sum ber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5 0 2 0 2 2 0 6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Mou Tansaksi Non Tunai	5 0 2 0 2 0 6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	98 SKPD	98 SKPD	98 SKPD	BK AD	98 SKPD	10.742.00 0	APB D		98 SKPD	42.080.00 0	BKAD
5 0 2 0 2 2 0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Pengelolaan Kas Daerah	5 0 2 0 2 0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan	25 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	BK AD	3 Laporan	30.400.00 0	APB D		3 Laporan	33.900.00 0	BKAD

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Targ et Akhir Periode Rens tra OPD	Realisasi Capaian RENJ A OPD Tahun 2022	Praktis Capaian Target RENJ A OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Cata tan Pent ing	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUN GJAWAB
									Lok asi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sum ber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Pemungutan/P emotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)											
5 0 2 0 2 2 03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase keterpenuhan pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5 0 2 0 2 03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase keterpenuhan pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	BK AD	100%	595.371.300	APB D		100%	945.034.113	BKAD
5 0 2 0 2 2 03 0 2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Laporan LO	5 0 2 0 2 03 00 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	BK AD	4 Dok	28.307.000	APB D		4 Dok	42.470.846	BKAD
5 0 2 0 2 2 03 0 3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah LRA yang disusun	5 0 2 0 2 03 00 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	BK AD	2 Dok	33.462.500	APB D		2 Dok	48.882.805	BKAD



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Targ et Akhir Periode Rens tra OPD	Realisasi Capaian RENJ A OPD Tahun 2022	Praktis Capaian Target RENJ A OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Cata tan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUN GJAWAB
									Lok asi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sum ber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5 0 2 0 2 2 03 0 5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang disusun dan diselesaikan tepat waktu	5 0 2 0 2 03 00 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	BK AD	2 Dok	354.024.3 00	APB D		2 Dok	674.102.9 61	BKAD
5 0 2 0 2 2 03 1 1	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jenis Pembinaan atas penyelenggaraan akuntansi	5 0 2 0 2 03 00 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	BK AD	2 Dok	179.577.5 00	APB D		2 Dok	179.577.5 00	BKAD
5 0 2 0 2 2 04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		5 0 2 0 2 04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					BK AD	100%	100.145.1 05.187	APB D		100%	109.829.4 38.168	BKAD

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Targ et Akhir Periode Rens tra OPD	Realisasi Capaian RENJ A OPD Tahun 2022	Praktis Capaian Target RENJ A OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Cata tan Pent ing	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUN GJAWAB
									Lok asi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sum ber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50202.0404	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman	50202.0404	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	BKAD	1 Kegiatan	3.191.298.036	APBD		1 Kegiatan	3.000.000.000	BKAD
50202.0408	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Validasi Administrasi/Doku menPenerima	50202.0408	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	BKAD	40 Desa	91.788.792.151	APBD		40 Desa	100.000.000.000	BKAD
50202.0409	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	50202.0409	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	BKAD	1 Kegiatan	5.165.015.000	APBD		1 Kegiatan	6.000.000.000	BKAD
50202.0505	Pengelolaan Data Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkungan Keuangan Daerah		50202.0505	Pengelolaan Data Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkungan Keuangan Daerah					BKAD		295.471.000				414.719.084	BKAD
50202.0501	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan analisis data keuangan	50202.0501	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	BKAD	60 Lap	86.231.500	APBD		60 Lap	68.387.934	BKAD

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Targ et Akhir de Rens tra OPD	Reali sasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Praki raan Capaian Targ et RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Cata tan Pent ing	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUN GJAWAB	
									Lok asi	Target Kinerja	Kebutuha n Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sum ber Dana		Target Kinerja	Kebutuha n Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5 0 2 0 2 2 05 0 2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jenis Pelaksanaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	5 0 2 0 2 05 00 02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	BK AD	1 Kegiatan	130.222.500	APB D		1 Kegiatan	138.532.460	BKAD	
5 0 2 0 2 2 05 0 3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jenis Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	5 0 2 0 2 05 00 03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	BK AD	12 Bulan	79.017.000	APB D		12 Bulan	207.798.690	BKAD	
5 0 2 0 3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan ketersediaan data aset yang akurat		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan ketersediaan data aset yang akurat				BK AD		779.187.550	APB D			1.135.097.435	BKAD	
		Cakupan Aset (tanah) milik Pemerintah yang memiliki sertifikat	5 0 2 0 3		Cakupan Aset (tanah) milik Pemerintah yang memiliki sertifikat					BK AD			APB D				BKAD
		Cakupan aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan			Cakupan aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan					BK AD			APB D				BKAD
5 0 2 0 3 01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jenis Barang Milik Daerah yang dikelola	5 0 2 0 3 01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jenis Barang Milik Daerah yang dikelola				BK AD	100%	779.187.550	APB D		100%	1.135.097.435	BKAD	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Targ et Akhir Periode Rens tra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Praktis Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Cata tan Pent ing	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUN GJAWAB
									Lok asi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sum ber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5 0 2 3 01 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga Yang ditetapkan	5 0 2 3 01 00	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	BK AD	2 dokumen	134.041.000	APB D		2 dokumen	43.070.495	BKAD
5 0 2 3 01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	5 0 2 3 01 00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	BK AD	2 dokumen	3.563.650	APB D		2 dokumen	5.617.619	BKAD
5 0 2 3 01 04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah regulasi pengelolaan aset BMD yang tersusun dan tersosialisas	5 0 2 3 01 00	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Perda 5 Perbu p	1 Perbu p	1 Perbu p	BK AD	1 Perbu p	44.614.000	APB D		1 Perbu p	25.746.864	BKAD
5 0 2 3 01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan pengelolaan data aset daerah	5 0 2 3 01 00	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	BK AD	5 dokumen	243.880.700	APB D		5 dokumen	417.484.388	BKAD
5 0 2 3 01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan data aset yang ter-update dan terinci	5 0 2 3 01 00	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	36 Entitas	7 Entitas	7 Entitas	BK AD	7 Entitas	83.805.200	APB D		7 Entitas	68.488.602	BKAD
5 0 2 3 01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah aset bersertifikat dan ber BPKB	5 0 2 3 01 00	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	30 Sertifikat 20 BPKB	30 Sertifikat 20 BPKB	30 Sertifikat 20 BPKB	BK AD	30 Sertifikat dan 20 BPKB	63.738.000	APB D		30 Sertifikat dan 20 BPKB	133.285.130	BKAD

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Targ et Akhir Periode Rens tra OPD	Realisasi Capaian RENJ A OPD Tahun 2022	Praktis Capaian Target RENJ A OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
									Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sum ber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50202010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jenis dokumen atas hasil optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah	502030100	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	25 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	BKAD	5 Jenis	99.413.000	APBD		5 Jenis	150.067.921	BKAD
502030101	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	50203010011	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	BKAD	1 Laporan	17.863.500	APBD		1 Laporan	17.863.500	BKAD
502030103	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah pengelola Barang Milik Daerah yang dibina	50203010013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	36 Entitas	36 Entitas	36 Entitas	BKAD	36 Entitas	88.268.500	APBD		36 Entitas	273.472.917	BKAD

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 berisi Program Pembangunan Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru Kab. Barru dan RPJMD Kabupaten Barru. Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan pada tahun 2024 adalah sebanyak 3 Program, 13 Kegiatan dan 48 Sub kegiatan dengan perkiraan Pagu pendanaan sebesar Rp. 109.822.493.285 Sumber Pendanaan yaitu dari Dana Alokasi Umum. Uraian tentang Misi, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, subkegiatan dan indikator kinerja 2024 dapat dilihat pada tabel 4.1

**Tabel 4.1**

**Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024**

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN				Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2				3	4	5	6
<b>Misi 6 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi.</b>								
<b>Tujuan : Mewujudkan reformasi birokrasi di lingkup BPKAD</b>						<b>Indeks Reformasi Birokrasi BKAD</b>	<b>B</b>	
<b>Sasaran : Meningkatnya kualitas penerapan/implementasi SAKIP BPKAD</b>						<b>Nilai SAKIP BKAD</b>	<b>B</b>	
5	<b>URUSAN PENUNJANG</b>							
5	2	<b>KEUANGAN</b>						
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Nilai Maturitas SPIP BKAD Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	3,00 20 JPL 6.241.474.248
5	02	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan, penggaran dan pelaporan hasil evaluasi kinerja BPKAD	100% 2.820.500
5	02	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok 2.820.500
5	02	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen laporan keuangan	Persentase keterpenuhan dokumen keuangan BPKAD	100% 4.984.430.048
5	02	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100% 4.984.430.048
5	02	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya ASN yang mengikuti diklat kompetensi	Persentase ASN berkinerja baik	100% 89.276.000



KODE REKENING					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
5	02	01	2,05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Diklat	89.276.000
5	02	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah sarana dan Prasarana BPKAD yang tersedia	100%	242.758.500
5	02	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Jenis	3.845.000
5	02	01	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Jenis	8.021.000
5	02	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	230.892.500
5	02	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase keterpenuhan BMD penunjang kelancaran urusan pemerintahan	100%	516.500.000
5	02	01	2,07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	482.400.000
5	02	01	2,07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	34.100.000
5	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya layanan jasa penunjang urusan kantor	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	306.189.200
5	02	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Jenis	306.189.200

KODE REKENING					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
5	02	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara	100%	99.500.000
5	02	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	40.000.000
5	02	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	9.500.000
5	02	01	2,09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000
<b>Tujuan : Meningkatkan Manajemen Pemerintahan yang Melayani Baik dan Bersih</b>							<b>Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>76,45</b>	
<b>Sasaran : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan yang Akuntabel dan Pelayanan Publik yang Baik</b>							<b>Opini BPK</b>	<b>WTP</b>	
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan RKA Tepat Waktu	100%	102.801.831.487
							Persentase Realisasi Pengeluaran Kas Daerah Terhadap Realisasi Penerimaan Kas Daerah	100%	
							Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Ke BPK RI Tepat Waktu	100%	
							Persentase Penetapan perda APBD Tepat Waktu	100%	

KODE REKENING					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase keterpenuhan Dokumen Anggaran Daerah yang disahkan Tepat Waktu	100%	1.416.959.000
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dok	40.910.000
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dok	34.647.000
5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 SKPD	5.941.500
5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 SKPD	6.056.500
5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi DPA SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	44 SKPD	6.459.000
5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	44 SKPD	6.347.500
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dok	357.401.000
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dok	406.942.000
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	10 Regulasi	353.634.500
5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dok	6.347.500

KODE REKENING					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dok	6.347.500
5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dok	6.347.500
5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	179.577.500
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rata - rata Waktu Penerbitan Dokumen Administrasi Pengeluaran Kas	100%	348.925.000
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	44 SKPD	260.691.000
5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	7 Kegiatan	47.092.000
5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	98 SKPD	10.742.000

KODE REKENING					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	3 Laporan	30.400.000
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase keterpenuhanpelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	595.371.300
5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 Dok	28.307.000
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2 Dok	33.462.500
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dok	354.024.300

KODE REKENING					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Dok	179.577.500
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Urusan Kewenangan Pengelolaan Daerah yang Dilaksanakan	100%	100.145.105.187
5	02	02	2.04	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Kegiatan	3.191.298.036
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Validasi Administrasi/Dokumen Penerima	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	40 Desa	91.788.792.151
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Kegiatan	5.165.015.000
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkungan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Data Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkungan Keuangan Daerah	Jenis pemeliharaan dan pengembangan SIPD	1 jenis	295.471.000
5	02	02	2.05	0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	60 Lap	86.231.500
5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Kegiatan	130.222.500

KODE REKENING					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
5	02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	12 Bulan	79.017.000
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Cakupan ketersediaan data aset yang akurat	100%	779.187.550
							Cakupan Aset (tanah) milik Pemerintah yang memiliki sertifikat		
							Cakupan aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan		
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jenis Barang Milik Daerah yang dikelola	100%	779.187.550
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 dokumen	134.041.000
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 dokumen	3.563.650
5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Perbup	44.614.000
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	5 dokumen	243.880.700
5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	7 Entitas	83.805.200
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	30 Sertifikat dan 20 BPKB	63.738.000



KODE REKENING					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Jenis	99.413.000
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	17.863.500
5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	36 Entitas	88.268.500

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renja BKAD Kab. Barru Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi BKAD Kab. Barru di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

#### **A. Catatan Penting**

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja BKAD Kab. Barru Tahun 2024 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja BKAD pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kab. Barru ;
2. Penyusunan Renja BKAD Kab. Barru Tahun 2024 berpedoman pada Renstra BKAD Kab. Barru Tahun 2021-2026.

#### **B. Kaidah Pelaksanaan**

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja BKAD Kab. Barru Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Renja BKAD ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKAD Kab. Barru Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kab. Barru. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kab. Barru

#### **C. Rencana Tindak Lanjut**

Untuk rencana tindak lanjut dari Penyusunan Dokumen Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam perubahan Renja BKAD Tahun 2024.

Dengan disusunnya Renja BKAD Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BKAD pada tahun 2024.



KEPALA BADAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH KABUPATEN BARRU

**ABUBAKAR, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19660816 198603 1 010